

**THE ROLE OF TVRI's REGIONAL STATIONS IN SUPPORTING THE
DEVELOPMENT OF DEMOCRACY
(Researches on TVRI Stations in Sulawesi Tenggara and Jambi
Provinces)**

**PERAN TVRI STASIUN DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN DEMOKRASI
(STUDI TERHADAP TVRI SULAWESI TENGGARA
DAN TVRI JAMBI)**

Handrini Ardiyanti "

Naskah diterima tanggal 15 Desember 2012,
disetujui tanggal 5 Februari 2013

Abstract

Indonesia's national television (TVRI) as a public broadcasting is expected to be able to give balance services to three different branches of power, namely, the executive, legislative, and judicative to support the development of democracy in the country. Based on the research conducted in Southeast Sulawesi and Jambi provinces, the substances of broadcasting of the regional stations are still dominated with information come from the executive side. That is why the writer of this research report argues that there must be a regulation which can make TVRI to successfully give balance services to the three different state institutions.

Keywords: TVRI, Sulawesi Tenggara, Jambi, democracy

Abstrak

TVRI sebagai lembaga penyiaran publik hendaknya melakukan peliputan dan tayangan program-program secara berimbang terhadap lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif sebagai salah satu upaya pengembangan demokrasi yang ideal. Berdasarkan hasil

Tulisan ini merupakan penelitian penulis di TVRI Sulawesi Tenggara dan TVRI Jambi tahun 2011.
Penulis adalah peneliti muda bidang Komunikasi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI. Alamat e-mail : handrini@gmail.com

penelitian, pelaksanaan kegiatan peliputan dan penyiaran serta program TVRI daerah masih didominasi oleh informasi-informasi yang berasal dari lembaga eksekutif daripada liputan dan tayangan program yang terkait dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Karena itu perlu ada penegasan dalam pengaturan peliputan dan tayangan program yang dilakukan TVRI daerah secara berimbang antara ketiga lembaga tersebut.

Kata Kunci: TVRI, Sulawesi Tenggara, Jambi, demokrasi

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

TVRI mengalami masa keemasan dalam perkembangannya sebelum hadirnya TV swasta nasional. Masa keemasan TVRI dimulai dengan keberpihakan pemerintah untuk mendirikan stasiun daerah yang di seluruh penjuru nusantara dimulai dengan didirikannya TVRI stasiun daerah pada tahun 1965 seiring dengan dioperasikannya Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSDP). TVRI stasiun Medan menyusul pada tahapan selanjutnya yang didirikan pada tahun 1970 hingga akhirnya sampai saat ini TVRI berikut TVRI nasional telah berjumlah 28 stasiun.

Peran TVRI dari masa ke masa tidak pernah dapat terlepas dari politik. Tarik-menarik kepentingan yang melibatkan kekuatan-kekuatan politik dominan, senantiasa membatasi ruang-gerak TVRI untuk menjadi lembaga penyiaran yang benar-benar mengabdikan kepada kemaslahatan publik.

Di era Orde Lama, TVRI adalah perangkat propaganda untuk menopang nasionalisme dan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Di era Orde Baru, TVRI adalah perangkat politik untuk memaksakan konsensus-konsensus nasional tentang pembangunan, stabilitas politik dan persatuan bangsa yang banyak menguntungkan Golongan Karya sebagai *the ruling party*.¹ Pasca reformasi seiring dengan menguatnya demokrasi, peran TVRI pun tak lagi menjadi perangkat politik pemerintah yang berkuasa.

Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka TVRI diletakkan sebagai sebuah institusi yang memiliki peran utama sebagai wadah terjadinya diskursus publik dan sarana warga negara untuk dapat berpartisipasi langsung dalam penentuan kebijakan publik.

¹ Agus Sudibyo, *Masa Depan TVRI dan Pragmatisme Politik*, <http://agussudibyo.wordpress.com/2008/03/28/masa-depan-tvri-dan-pragmatisme-politik/> diakses Jumat, 14 Desember 2012 pukul 17.15 wib.

Peran yang dijalankan TVRI inilah yang disebut Siebert dan Peterson bahwa media massa merupakan pilar keempat karena itu media massa harus independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai salah satu lembaga penyokong demokrasi.²

Namun sayangnya, terkait hubungan antara TVRI stasiun daerah dengan ketiga lembaga yang merupakan pilar utama demokrasi sendiri tidak diatur secara tegas dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sementara di lain sisi, diakui atau tidak, dalam pengembangan demokrasi tiga pilar kekuasaan kerap kali saling bertarung yang membuat kita dihadapkan pada situasi fluktuatif dari kinerja masing-masing pilar utama.³

Karena itu diperlukan keberimbangan liputan dan tayangan program terhadap tiga pilar kekuasaan demokrasi oleh TVRI stasiun daerah dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan demokrasi.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Keberimbangan liputan dan tayangan program terhadap tiga pilar kekuasaan oleh TVRI Stasiun daerah merupakan pra syarat bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan demokrasi. Namun keberadaan TVRI sebagai perangkat politik pemerintah di masa lalu menyebabkan TVRI ditengarai tidak mampu melepaskan diri dari label humas pemerintah sehingga TVRI tidak mampu menjalankan peran utama sebagai wadah terjadinya diskursus publik dan sarana warga negara untuk dapat berpartisipasi langsung dalam penentuan kebijakan publik.

Karena itu maka penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian adalah bagaimana peran TVRI daerah dalam pengembangan demokrasi? permasalahan apa saja yang dihadapi TVRI Daerah dalam pelaksanaan perannya dalam upaya pengembangan demokrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana TVRI Stasiun daerah selaku televisi publik dalam pengembangan demokrasi yang meliputi:

- a. Peran TVRI daerah dalam pengembangan demokrasi.
- b. Mengetahui berbagai aspek permasalahan terkait dengan pelaksanaan peran tersebut.

² Werner J. Severin & James W. Tankar Jr, "Teori Komunikasi, Sejarah, Metode & Terapan di dalam Media Massa, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 419-421.

³ Afnan Malay, Terperangkap Teks Hukum, Opini, Koran Tempo, 12 Desember 2007.

Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- b. Memberikan masukan terhadap penyusunan peraturan perundangan lainnya terkait dengan Lembaga Penyiaran Publik khususnya Televisi Publik di daerah.
- c. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penyiaran lembaga penyiaran publik di daerah dalam kerangka pengembangan demokrasi.

D. Kerangka Pemikiran

1. TV Publik

TVRI merupakan salah satu dari lembaga penyiaran publik di Indonesia. Lembaga penyiaran publik secara khusus didefinisikan oleh Effendi Gazali sebagai lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau penyiaran televisi atau penyiaran berlangganan yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi publik melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut. Berbeda dengan lembaga penyiaran komersial yang mengutamakan *economic determinism*, di mana seolah-olah semua aspek tingkah laku institusi penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi dengan logika *never-ending circuit of capital accumulation: MCM (Money – Commodities – More Money)* - lembaga penyiaran publik menitikberatkan perhatian kepada kepentingan dan kepuasan publik sebagai tolok ukur keberhasilan program.⁴

TV Publik merupakan lembaga penyiaran yang memberikan pelayanan publik melalui media televisi. Pelayanan publik melalui media televisi menurut Bignell dilaksanakan dengan menayangkan program yang menginformasikan, mengedukasi dan mendorong kemajuan penonton dan masyarakat pada umumnya. Bagus tidaknya kualitas sebuah program dalam penyiaran publik terletak pada eksklusifitas dan lebih memiliki nilai budaya daripada program lainnya.⁵

TVRI mendapatkan anugerah sekaligus kepercayaan untuk menjadi Televisi Publik TVRI menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai TV Publik sejak 28 Desember 2005 sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2002 tentang

⁴ Effendi Gazali, *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak, Sebuah Acuan tentang penyiaran Publik dan Komunitas*, Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta, 2002, hal.xii.

⁵ Jonathan Bignell, *An Introduction To Television Studies*, Routledge, London & New York, 2004, hal.18.

Penyiaran. Sebagai Televisi Publik, TVRI harus mampu berperan aktif untuk menyediakan ruang bagi wacana publik, menghidupkan peran supervisi publik sebagai khalayak dan juga mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam mendukung tersajinya program acara yang benar-benar mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sesuai pasal 3 PP 11 tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dikatakan, TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, sekaligus kontrol dan perekat sosial. Keikutsertaan publik oleh karenanya menjadi jiwa dari operasional TVRI sekarang. Bagaimana publik melekat dalam seluruh aktivitas dan gairah kreativitas berkarya.

Fungsi utama stasiun publik di Indonesia adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan faktor pertama yang harus dipertimbangkan sebelum menyusun strategi program.⁶

2. Demokrasi dan Penyiaran

Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat *well informed* dalam memberikan aspirasi politiknya. Media massa menjadi sangat penting dalam demokrasi karena media massa diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan aspirasi politik masyarakat. Media massa memang berperan sebagai "*marketplace of ideas*", yakni sebagai wadah aspirasi tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat melalui media massa.

Disinilah arti penting lembaga penyiaran publik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat bukan sekedar informasi yang diinginkan demi terbangunnya kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Karena lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sebagai warga Negara. Untuk itu lembaga penyiaran public dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (*public*) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.⁷

Hubungan antara pemerintah dan media dan politik, dan media dengan masalah globalisasi dan lokalitas, keduanya menjadi hal yang kontroversial dalam kajian media umumnya. Media khususnya media

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

⁷ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

penyiaran sebagaimana diungkapkan oleh teori Habermas (1997) tentang konsep lingkungan publik (*public sphere*) diharapkan mampu berfungsi sebagai ruang sosial untuk artikulasi mengenai masyarakat sipil, yaitu semua tempat fisik dan ruang yang termediasi, dimana diskusi terbuka mengenai masalah kepentingan publik dapat dilakukan dengan bebas.⁸

3. Peran Politik Media

TVRI daerah merupakan salah satu bagian dari sekian banyak media massa. Dalam kehidupan demokrasi, asumsi utama dalam kajian demokratisasi adalah, semakin independen media penyiaran dan semakin besar kebebasan yang dimiliki maka akan memberi kontribusi positif pada perubahan politik, mendukung transisi demokrasi dan meruntuhkan rejim yang otoritarian. Dengan kata lain, media dapat memainkan peranan yang sangat besar khususnya pada saat babak politik dalam transisi, karena media dapat bertindak sebagai agen perubahan. Neuman menjelaskan bahwa kebebasan memegang peranan penting di Asia Tenggara, khususnya dalam proses liberalisasi politik yang berhubungan dengan munculnya pers yang lebih terbuka dan kritis.⁹

Lalu, apa fungsi yang ditunjukkan oleh media sebagai institusi politik? Salah satu fungsi yang telah dirancang oleh Soeharto dan elite negara dalam negara berkembang adalah, mempromosikan ideologi nasional dan melegitimasi proses pembangunan. Dalam menjalankan fungsi ini, pers adalah sebagai sebuah agen stabilitas, yang bertugas membantu melestarikan tatanan sosial politik. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan istilah *development journalism*.

Fungsi kedua adalah memonitor tatanan politik pada masa damai, melakukan *checks and balances*. Fungsi ketiga adalah sebagai *fire-fighting*, yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi saat krisis. Beberapa contoh di Asia dapat menunjukkan hal ini, yakni peran media dalam menggulingkan rezim Marcos di Filipina di tahun 1986, atau dukungan yang ditunjukkan pers pada demonstrasi pro - demokrasi pada bulan Mei 1992 di Bangkok. Dalam fungsi ketiga ini, pers merupakan agen perubahan (*agent of change*).¹⁰

⁸ Douglas Kellner, Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention, <http://gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm> diakses 15 Juli 2011.

⁹ Neuman dalam Siti Aminah, *Politik Media, Demokrasi Dan Media Politik*, hal.2, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/POLITIK%20MEDIA,%20%20DEMOKRASI.pdf> diakses 15 Juli 2011.

¹⁰ Siti Aminah, *Politik Media, Demokrasi Dan Media Politik*, *ibid*.

Mengevaluasi sikap dari peran politik yang ditampilkan oleh pers dalam situasi tertentu memerlukan 2 (dua) kecermatan mendalam mengenai dua faktor berikut: pertama, kepemilikan dan kontrol publikasi; dan kedua, hubungan antara pemilik perusahaan media, jurnalis, dan pemegang kekuasaan. Susan Pharr, yang mengemukakan adanya 4 (empat) pandangan yang saling berlawanan, yaitu: pertama media sebagai penonton (*spectator*); kedua, sebagai penjaga (*watchdog*); ketiga, sebagai pelayan (*servant*); dan keempat, sebagai penipu (*trickster*). Pharr memandang media sebagai penipu, sebuah kosa kata yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, penipu merupakan partisipan aktif dalam proses politik. Dampak utama dari peran penipu sebagai pembangun komunitas. Label penipu kemudian berubah menjadi kosa kata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang penuh dengan kebaikan.

E. Metode Penelitian

a) Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada 29 Juni s.d. 5 Juli 2011 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan 11 s.d. 17 September 2011 untuk Provinsi Jambi. Tempat penelitian adalah Jambi karena dalam hal ini TVRI Stasiun Jambi mewakili daerah barat Indonesia, dan Sulawesi Tenggara dimana TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara mewakili daerah tengah dan timur Indonesia.

b) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan dokumen terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti diantaranya dokumen yang berisi tentang program dan siaran televisi publik di daerah serta dokumen-dokumen kegiatan humas di ketiga lembaga yaitu Humas Sekretariat Daerah Provinsi, Humas DPRD Provinsi serta Humas Pengadilan Negeri .
- 2) Melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari TVRI Sulawesi Tenggara, TVRI Jambi serta Humas Sekretariat Daerah Provinsi, Humas DPRD Provinsi serta Humas Pengadilan Negeri.

c) Metode Analisis Data

Mengacu model interaktif, analisis data tidak saja dilakukan setelah pengumpulan data, tetapi juga selama pengumpulan data. Selama tahap penarikan simpulan, peneliti selalu merujuk kepada "suara dari lapangan" untuk mendapatkan konfirmasi. Analisis selama pengumpulan data

(*analysis during data collection*) dimaksudkan untuk menentukan pusat perhatian (*focusing*), mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, serta memberikan dasar bagi analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*). Dengan demikian analisis data dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*). Pada setiap akhir pengamatan atau wawancara, dicatat hasilnya ke dalam lembar catatan lapangan (*field notes*). Lembar catatan lapangan ini berisi: (1) teknik yang digunakan, (2) waktu pengumpulan data dan pencatatannya, (3) tempat kegiatan atau wawancara, (4) paparan hasil dan catatan.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum TVRI

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdirinya tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial.

TVRI didirikan sebagai salah satu unsur pendukung suksesnya proyek Asian Games ke IV tahun 1962 di Jakarta. Untuk melengkapi persiapan penyelenggaraan Asian Games ke IV, pemerintah, mendirikan studio serta menara pemancar darurat di kompleks Senayan Jakarta yang kini menjadi lokasi TVRI pusat, menyiarkan program secara nasional.

Siaran perdana TVRI dilakukan bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17, pada tanggal 17 Agustus 1962. Bersamaan dengan dibukanya Asian Games IV tanggal 24 Agustus 1962, maka diperkenalkanlah siaran TV setiap hari. Karena itulah maka tanggal 24 Agustus ditetapkan menjadi hari lahirnya Televisi Republik Indonesia (TVRI).

12

¹¹ Susan Pharr dalam Siti Aminah, *Politik Media, Demokrasi Dan Media Politik*, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/POLITIK%20MEDIA,%20%20DEMOKRASI.pdf> diakses 15 Juli 2011.

¹² Televisi Republik Indonesia, <http://www.tvri.baliserve.com/home/home.php>, diakses pada 13 Februari 2013.

Pada tahun 1965, TVRI Yogyakarta diresmikan, ini merupakan stasiun ke dua di Indonesia setelah Stasiun Pusat Jakarta. Sejalan dengan kegiatan pembangunandi tanah air kita, maka dunia pertelevisian di Indonesia terus berkembang, volume dan mutu siaranpun semakin ditingkatkan, demikian pula perkembangan sarana dan prasarananya, lebih-lebih sejak beroperasinya System Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD).¹³

Pada tahun 1970 menyusul dengan selesai pula dibangun TVRI Stasiun Medan, kemudian dibangunlah stasiun-stasiun daerah lainnya di Indonesia sehingga melengkapi jaringan TVRI. TVRI memiliki 28 stasiun di daerah yang terbagi menjadi 5 kelas yaitu TVRI Stasiun Kelas A, TVRI Stasiun Kelas B, TVRI Stasiun kelas C, TVRI Stasiun Kelas D dan TVRI Sektor Transmisi. Stasiun produksi dan penyiaran TVRI tersebut terdiri dari: TVRI Nasional yang berkedudukan di Jakarta, TVRI Nangroe Aceh Daerussalam (NAD), TVRI Sumatera Utara, TVRI Sumatera Barat, TVRI Riau, TVRI Sumatera Selatan, TVRI Jambi, TVRI Bengkulu, TVRI Lampung, TVRI Jawa Barat, TVRI DKI Jakarta, TVRI Yogyakarta, TVRI Jawa Tengah, TVRI Jawa Timur, TVRI Bali, TVRI Nusa Tenggara Barat, TVRI Nusa Tenggara Timur, TVRI Kalimantan Barat, TVRI Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Selatan, TVRI Kalimantan Tengah, TVRI Sulawesi Utara, TVRI Gorontalo, TVRI Sulawesi Tengah, TVRI Sulawesi Tenggara, TVRI Sulawesi Selatan, TVRI Maluku, TVRI Jayapura.

Selain membangun stasiun-stasiun produksi dan penyiaran Televisi R.I. di Indonesia, juga dibangun stasiun-stasiun relay yang jumlahnya hingga mencapai ratusan.¹⁴ TVRI memiliki visi yaitu terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan nasional. Sedang misi dari TVRI adalah:

1. Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis.
2. Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama.
3. Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan.
4. Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan negara Indonesia di dunia Internasional.¹⁵

¹³ Sejarah TVRI, *ibid*

¹⁴ Sejarah TVRI, *ibid*

¹⁵Visi dan Misi TVRI, http://www.tvri.baliserve.com/home/home.php?_mod=content_&printer=1&id=15#visimisi diakses 15 Juli 2011

Dalam sejarah berdirinya TVRI, TVRI pernah menjadi alat komunikasi Pemerintah yang pada saat itu memberikan tugas kepada TVRI untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan Pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan *two-way traffic* (lalu lintas dua jalur) antara pemerintah dengan rakyat.

Pada tanggal 24 Agustus 1962 dalam era Demokrasi Terpimpin, TVRI berbentuk Yayasan yang didirikan untuk menyiarkan pembukaan Asian Games yang ke IV di Jakarta. Memasuki era Demokrasi Pancasila pada tahun 1974, TVRI telah berubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan dengan status sebagai Direktorat yang bertanggungjawab Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film.

Dalam era Reformasi terbitlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 yang menetapkan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) di bawah pembinaan Departemen Keuangan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 TVRI berubah statusnya menjadi PT. TVRI (Persero) di bawah pembinaan Kantor Menteri Negara BUMN. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun di masa reformasi kebijakan terhadap pengelolaan TVRI mengalami beberapa perubahan di antaranya:

1. Bulan Juni 2000, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2000 tentang perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yang secara kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan RI.
2. Bulan Oktober 2001, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tentang pembinaan Perjan TVRI di bawah kantor Menteri Negara BUMN untuk urusan organisasi dan Departemen Keuangan RI untuk urusan keuangan.
3. Tanggal 17 April 2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2002, status TVRI diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) TVRI di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kementerian Negara BUMN.
4. Selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Semangat

yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri dan tidak komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika kehidupan TVRI adalah dinamika perjuangan bangsa dalam proses belajar berdemokrasi. Dalam penelitian ini, dari ke-26 stasiun penyiaran TVRI di daerah, penelitian ini dilakukan di TVRI Sulawesi Tenggara dan TVRI Stasiun Jambi. TVRI Sulawesi Tenggara merupakan TVRI Stasiun Kelas C, dengan jumlah pemancar : 12 yang berada di Kendari, Pomalaa, Bau-Bau, Banbung, Raha, Unaaha, Wanci, Boe Pinang, Punggaluku, Lasolo, Lasusua dan Ereka. Sedangkan TVRI Stasiun Jambi merupakan TVRI Stasiun kelas B dengan jumlah Pemancar : 9 yang berada di Jambi, Sungaipenuh, Bongko, Kualatungkal, Muarabungo, Sarolangun, Tungkal Ilir, Kerinci dan Tanah Sepenggal.¹⁶

B. Pembahasan

1. Peran TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi

Ada tiga peran utama yang telah dijalankan TVRI daerah dalam kerangka pengembangan demokrasi yaitu:

1. Memberikan informasi yang benar dan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga tercapai kondisi masyarakat yang *well informed* demi mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi.
2. Menjadi wadah aspirasi *marketplace of ideas* tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat melalui media massa.
3. Menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan aspirasi politik masyarakat, menyampaikan pendapat atau aspirasi masyarakat.

Keberimbangan liputan dan tayangan program terhadap tiga pilar pemegang kekuasaan dalam negara demokrasi belum tercipta dengan baik. TVRI Sulawesi Tenggara misalnya di antara berbagai program unggulan yang dimilikinya seperti musik pop daerah, Momima, Bahasa Indonesiaku, BIMBEL (Bimbingan Belajar), BAS (Band Anak Sekolah), Dharma Wacana, Bugar

¹⁶ TVRI, <http://www.tvri.baliseserve.com/home/home.php>, diakses 13 Februari 2013.

Sehat, Teropong Olah Raga, Pentas Anak Ceria, KORNET (Komputer dan Internet), POINT (Pop Indonesia Populer), Nihon Go, Gita Rema, To Know English, Bekas Tapi Mulus, Warta Sultra, Lintas Timur, Indahnya Persaudaraan, Dialog Sultra, Yang Terlupakan, Solusi, Jelajah Sultra, IRIS (Intip Ruang Instansi), Pesona Timur Indonesia dan lainnya hanya POLTRAMAS (Polisi Masyarakat) , MASDARKUM (Masyarakat Sadar Hukum) yang merupakan program yang memotret tentang penegakan hukum. Namun bagaimana kegiatan dan kebijakan DPRD Provinsi sebagai sebuah lembaga legislatif belum mendapat porsi yang memadai karena hanya ada satu program yaitu Rumah Rakyat.¹⁷

TV Publik sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, idealnya memberikan penguatan yang sama kepada ketiga pilar demokrasi lainnya yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun pada kenyataannya, TVRI di daerah lebih cenderung tidak berimbang. Porsi untuk penguatan eksekutif melalui program dan tayangannya lebih banyak ketimbang porsi untuk yudikatif maupun legislatif. Kondisi ini tampak dari berbagai program TVRI di daerah berikut ini:

Tabel 1
Program TVRI di Daerah

| TVRI Sulawesi Tenggara | TVRI Jambi |
|-------------------------------|-------------------|
| Pelangi Desa | Pelangi Desa |
| Daerah Membangun | Jambi Membangun |
| Pigura | Desaku |
| Pesona Budaya Nusantara | Dinamika Sumatera |
| Sentuhan Kalbu | Dunia Olahraga |
| Masdarkum | Feature |
| Membangun Moral | Kalender of Event |
| Suara Wakil Rakyat | Karikatur |
| Kalender Event | Kaldeskop |

*) hasil penelitian yang disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Kegiatan TVRI Sulawesi Tenggara dan TVRI Jambi.

Peliputan dan program untuk eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah provinsi menempati tempat tertinggi bila dibandingkan dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Peliputan dan program untuk eksekutif dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya dialog interaktif, *spot* iklan serta sosialisasi

¹⁷Program Acara Unggulan TVRI Sultra, <http://www.youtube.com/watch?v=cOw6fCBmxJY>, diakses 15 Juli 2011.

program pemda. Untuk pemda Sulawesi Tenggara program pemda yang disosialisasikan antara lain program pemda bahkan telah memiliki program tersendiri yaitu BATHRAMAS (Bahtera Mas).¹⁸

Rendahnya kerja sama antara TVRI daerah dengan DPRD Tingkat Provinsi antara lain disebabkan karena keterbatasan anggaran kehumasan di DPRD. Untuk DPRD Sulawesi Tenggara misalnya kerjasama dalam bentuk kontrak pembuatan program telah dihentikan sementara pada tahun 2011 karena ketiadaan anggaran. Upaya untuk mensosialisasikan kinerja Dewan maupun mensosialisasikan kebijakan-kebijakan DPRD seperti sosialisasi perda, hasil rapat dengar pendapat dengan eksekutif dan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian atau polemik di masyarakat disampaikan melalui permintaan bantuan peliputan maupun kehadiran Pimpinan dan anggota DPRD sebagai narasumber kedua dalam acara dialog interaktif dengan pihak eksekutif. Namun sayangnya tingkat efektifitas dari keberadaan dialog tersebut tidak cukup kuat karena biasanya dari pihak eksekutif yang menjadi narasumber utama bukan penentu paling akhir dari sebuah kebijakan sehingga apa yang menjadi pendapat dewan tidak terlalu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.¹⁹

Pada saat penelitian ini berlangsung TVRI Sulawesi Tenggara sudah memiliki acara khusus terkait dengan hukum sedangkan TVRI Jambi belum. Kondisi ini menunjukkan tidak ada suatu ketentuan tegas dari TVRI Pusat terkait dengan perlu ditayangkannya program-program yang mendorong ke arah terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan membuat masyarakat memahami hukum.

Setelah eksekutif, porsi program dan penayangan berita diberikan lebih banyak kepada lembaga legislatif ketimbang yudikatif. Minimnya peliputan dan sosialisasi pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat di Pengadilan Negeri disebabkan karena keberadaan humas di Pengadilan Negeri yang tidak memiliki anggaran tersendiri. Selain itu mekanisme kerja kehumasan di lembaga yudikatif khususnya pengadilan negeri masih bersifat pasif mengingat kehumasan lembaga yudikatif yang bersifat aktif biasanya merupakan domain pusat yaitu departemen Hukum dan HAM.²⁰

Pemberitaan dan penayangan program terkait dengan hukum khususnya peliputan berita terkait dengan permasalahan hukum yang dilakukan TVRI di daerah masih mengikuti pola TV komersial lainnya, yaitu

¹⁸ Wawancara dengan Humas Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Juli 2011.

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Humas/Hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara 5 Juli 2011.

hanya meliput persidangan terkait dengan permasalahan-permasalahan pidana yang menarik perhatian masyarakat. Metode peliputannya juga masih mengikuti pola pemberitaan TV komersial pada umumnya yaitu di awal kasus dan diakhir kasus pada saat keputusan persidangan.

Akibatnya kerap kali terjadi keterkejutan saat keputusan hakim dibacakan karena dianggap tidak sesuai. Padahal idealnya peliputan kasus-kasus di persidangan tidak terputus sehingga masyarakat dapat memahami alasan yang menjadi pertimbangan dengan mengetahui pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa. Terputusnya penayangan proses di pengadilan mengakibatkannya kerap terjadi keterkejutan di masyarakat saat keputusan dibacakan.

Mekanisme peliputan berita di pengadilan pun tidak terlalu spesifik kecuali hanya meminta ijin sebelum meliput berita. Namun ketiadaan dana secara khusus terkait kehumasan merupakan satu kendala bagi Pengadilan Negeri. Peliputan berita jalannya persidangan di Indonesia jauh lebih terbuka dari pengadilan negeri di Negara lainnya. Terbukanya jalannya persidangan selain diharapkan mampu memberikan penyadaran hukum kepada warga Negara juga menghindari terjadinya permainan dalam proses di pengadilan.

21

Namun secara umum kedua TVRI daerah telah berperan dalam menciptakan masyarakat *well informed* dan menjadi wadah aspirasi tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat dalam memberikan aspirasi politiknya melalui program dialog interaktif untuk kedua stasiun televisi dan acara Masdarkum untuk TVRI Sulawesi Tenggara.

Acara dialog interaktif dan Masdarkum juga telah mampu menjadi ruang sosial (*social space*) melakukan diskusi terbuka mengenai masalah kepentingan publik secara bebas.

TVRI Sulawesi Tenggara dan TVRI Jambi juga telah memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai programnya seperti peliputan berita dalam program bertajuk Jambi dalam Berita untuk TVRI Jambi dan Daerah Membangun untuk TVRI Sulawesi Tenggara. Selain itu TVRI daerah juga telah mampu memberi kontribusi positif pada pembangunan politik di daerah. Misalnya terkait dengan rencana pemilukada di Sulawesi Tenggara, TVRI Sulawesi Tenggara melakukan peliputan dan sosialisasi kegiatan tersebut dengan berusaha meminimalisir pemberitaan terkait dengan berbagai isu yang dikhawatirkan mampu menimbulkan gesekan-gesekan yang dikhawatirkan berujung pada konflik sosial.

²¹ Wawancara dengan Humas DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jambi 1 Juli 2011.

TVRI Sulawesi Tenggara dalam hal ini telah berupaya melakukan monitor politik dengan tetap memelihara terciptanya perdamaian di daerah dengan melakukan *checks and balances* terhadap berbagai kejadian di Sulawesi Tenggara seperti terjadinya kasus pembunuhan terhadap dua mahasiswa Universitas Haluoleo. Dalam hal ini TVRI Sulawesi Tenggara telah menempatkan diri sebagai penjaga (*watchdog*).

Permasalahan lainnya adalah bias informasi yang terjadi dalam penyampaian informasi terkait lembaga eksekutif sebagaimana dialami TVRI Sulawesi Tenggara dalam pemberitaan kasus pembunuhan yang terjadi di Universitas Haluoleo dengan alasan keamanan dan ketertiban.

Memberikan informasi yang benar adalah sesuatu kondisi yang selalu diupayakan TVRI daerah. Berafiliasinya para pemilik modal TV swasta kerap kali mendorong terbentuknya citra yang salah terhadap realitas. Pemberitaan TV swasta kerap kali berusaha membentuk pandangan yang sesuai dengan agenda mereka atau tepatnya para pemilik modal. Kerap kali isu-isu disederhanakan, dan direkayasa melalui "simbolisasi." Misalnya saja penayangan berita tentang DPR yang kerap menayangkan ulang gambar-gambar anggota tertidur di saat Rapat Paripurna secara berulang-ulang atau menayangkan gambar saat terjadi keributan di ruang sidang DPR.

Pendistorsian realitas dengan cara menyembunyikan permasalahan pokoknya juga kerap kali dilakukan TV swasta. TV swasta cenderung menghilangkan pandangan-pandangan yang tak sejalan dengan agendanya dengan menampilkan nara sumber yang sesuai dengan agendanya karena adanya tekanan secara diam-diam terhadap staf dan karyawannya, seperti kepada reporter, atau pihak-pihak lain, agar tidak menyinggung atau "melukai" tujuan bisnis dari para sponsor atau perusahaan induknya.

Pembentukan citra yang salah dan pendistorsian realitas adalah dua hal yang selalu diupayakan dihindari TVRI di daerah dengan cara menampilkan berita dan kejadian yang seharusnya diketahui publik secara berimbang.

Salah satu contohnya adalah TVRI Sulawesi Tenggara dalam penayangan berita tentang peristiwa tewasnya dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari pada 8 September 2011. TVRI Sulawesi Tenggara berusaha menghindari agar pemberitaan motif pembunuhan yang berlatar belakang dendam tidak mengarah pada masalah suku.²²

TV komersial yang kerap kali mengacu pada *trend* pasar dalam penentuan programnya. Akibatnya tayangannya mayoritas bersifat sensasional, kerap kali mengandung pornografi, kekerasan dan kejahatan

²² Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tenggara Irfan 2 Juli 2011.

serta mistik dan klenik. Tayangan semacam itulah yang selalu dihindari TV Publik.

TV publik dalam penentuan program selalu mendasarkan diri pada kualitas program yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut TV Publik yaitu mendidik, mencerahkan, menciptakan jaring-jaring sosial ekonomi.²³

Namun praktek di lapangan menunjukkan TVRI mayoritas lebih sering menayangkan program dalam upaya melestarikan budaya ketimbang peran TVRI dalam upaya memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi.

TV komersial yang menerapkan kebijakan segmentasi pasar seperti Metro TV dan TV One yang memiliki target *audience* (segmentasi) yang jelas. mereka melakukan *positioning* sedemikian rupa hingga memiliki keunikan serta kekhasan dibandingkan stasiun-stasiun televisi lain yang lebih menekankan pada program yang sifatnya news kepada publik. Sementara TV publik melayani *audiens* sebagai masyarakat secara keseluruhan.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Peran TVRI dalam Pengembangan Demokrasi

Secara umum TVRI di daerah tidak menemui kendala-kendala yang berarti, karena telah terdukung oleh sarana dan prasarana penunjang siaran melalui pendanaan APBN diantaranya untuk menyajikan paket berita yang dapat memenuhi keinginan masyarakat akan informasi yang seimbang dan akurat, menyajikan program, hiburan yang inspiratif berwawasan etnik lokal.

Meski demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi TVRI di daerah, antara lain:

- a. Prasarana siaran yang kurang memadai terutama pemancar. Masih terdapat daerah-daerah yang belum terjangkau siaran TVRI. Stasiun relay TVRI Sulawesi Tenggara di Wanci, Pulau Wangi-wangi misalnya sudah lama mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi. Karena pendanaan dari TVRI Pusat sangat lambat maka akhirnya TVRI Sulawesi Tenggara mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menganggarkan biaya pembangunan pemancar baru untuk TVRI Sulawesi Tenggara.²⁴

²³ Kepala Pusat Diklat TVRI Purnama Suwardi dalam FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, 29 Juli 2011.

²⁴ Kesimpulan peneliti berdasarkan penuturan Kepala Seksi Teknik Sumarno dalam FGD di TVRI Sulawesi Tenggara FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di TVRI Sulawesi Tenggara, Kendari 5 Juli 2011.

- b. Masih adanya masyarakat yang kurang berpihak kepada lembaga publik, seperti TVRI misalnya saja Humas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota masih cenderung memasang iklan di TV komersial lainnya daripada memasang iklan layanan masyarakat di TVRI atau bekerja sama dengan TVRI di daerah.²⁵

Humas Pemda cenderung membagi secara adil porsi kerjasama advetorial dan program dengan seluruh media televisi yang ada di daerah dengan maksud menjaga hubungan baik dengan seluruh media masa televisi yang ada di daerah.²⁶

- c. Budaya kerja dan teknik penyiaran TVRI di daerah dimana semua lini belum siap melakukan perubahan dan lemahnya etos kerja PNS, sehingga mempengaruhi output siaran. Meski secara keseluruhan, kinerja TVRI di daerah mengalami peningkatan dari yang semula 2 jam perhari di tahun 2006 menjadi 4 – 5 jam perhari di tahun 2010 materi siaran produksi baru setiap tahun mengalami peningkatan kurang lebih hampir mencapai angka 100 %. Rendahnya budaya kerja ini antara lain disebabkan karena rendahnya gaji pegawai TVRI daerah baik itu yang PNS maupun honorer bila dibandingkan dengan TV swasta dengan jabatan yang sama. Meski telah ada tunjangan operasional, namun nilai tunjangan operasional tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan di TV swasta. Kisaran tunjangan operasional di TVRI hanya berkisar antara Rp 200.000 sampai Rp1.000.000. Gaji pegawai di TVRI daerah sesuai dengan standar PNS pada umumnya, sementara gaji produser berita di sebuah TV swasta baru saja bisa mencapai 40 juta di tahun 2008.²⁷
- d. Timpangnya jumlah pegawai PNS dan honorer. Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti perbandingan antara jumlah pegawai PNS dan honorer di tahun 2009 PNS mencapai 83,32 % sedang Non PNS atau honor mencapai 16,68 %. Sedangkan di tahun 2010 untuk jumlah pegawai PNS berkisar 80, 52 % dan pegawai non PNS hanya 19, 48 %. Pegawai non PNS biasanya berkaitan dengan kreatif misalnya penyiar dan programer. Ketimpangan ini dapat mengakibatkan kurangnya profesionalitas dalam melakukan liputan. Adanya hierarki struktural antara

²⁵ Kesimpulan peneliti berdasarkan wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tenggara pada FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di TVRI Sulawesi Tenggara, Kendari 5 Juli 2011.

²⁶ Kesimpulan peneliti berdasarkan wawancara dengan Humas Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di TVRI Sulawesi Tenggara, Kendari 5 Juli 2011.

²⁷ Kesimpulan peneliti dari hasil FGD di TVRI Sulawesi Tenggara FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di TVRI Sulawesi Tenggara, Kendari 5 Juli 2011.

staf TVRI daerah yang melakukan liputan dengan Pimpinan Humas Pemerintah Daerah menyebabkan eksekutif lebih dominan dalam liputan dan tayangan program

- e. Kurangnya jumlah pegawai TVRI di daerah. Berdasarkan hasil wawancara, penerimaan pegawai di TVRI daerah secara keseluruhan di tahun 2009/2010 hanya 31 orang dan di TVRI Sulawesi Tenggara dan TVRI Jambi tiada ada pegawai yang direkrut. Sementara jumlah pegawai terus menerus mengalami penurunan karena pensiun. Tercatat di tahun 2010 mencapai 48,48 %.²⁸
- f. Pola penganggaran di TVRI daerah mengikuti pola penganggaran umum. Hal itu sangat menyulitkan kerja para kru liputan khususnya pada saat peliputan bencana. Akibatnya nilai aktualitas berita TVRI daerah tertinggal bila dibandingkan dengan aktualitas TV swasta.²⁹
- g. Rendahnya kinerja bidang program dan pengembangan bidang usaha menyebabkan rendahnya penerimaan non APBN. Berdasarkan dokumen, untuk TVRI Sulawesi Tenggara misalnya hanya berani menargetkan penerimaan non APBN sebesar Rp. 1.444.514.000 sedangkan penerimaan dari APBN sebesar Rp. 5.951.148.000. Untuk TVRI Jambi hanya berani menargetkan Rp. 1.594.800.000 untuk sumber non APBN, sementara penerimaan dari APBN mencapai Rp. 6.045.640.000.³⁰
- h. Minimnya pemahaman redaksi dan reporter TVRI stasiun daerah tentang proses peradilan di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum dalam liputan proses peradilan.

Timpangnya perbandingan kerja sama antara TVRI daerah dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan kerja sama antara TVRI daerah antara lembaga legislatif baik itu DPRD Tingkat I dan II maupun kerja sama TVRI daerah dengan lembaga yudikatif seperti Pengadilan Negeri telah menyebabkan peliputan dan pemrograman untuk acara-acara di TVRI daerah tidak berimbang.

Untuk itu perlu adanya penegasan agar TVRI daerah jangan sampai menjadi corong atau humas dari pemerintah daerah dengan menayangkan acara-acara yang hanya bersifat seremoni seperti kegiatan kerja gubernur atau bupati/walikota.

²⁸ Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tenggara dan TVRI Jambi pada 13 September 2011.

²⁹ Kesimpulan peneliti berdasarkan wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi pada 13 September 2011.

³⁰ Kasi Program dan Pengembangan Usaha TVRI Sulawesi Tenggara Arie.M. Djong dalam FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di TVRI Sulawesi Tenggara, Kendari 5 Juli 2011.

Peliputan TVRI daerah terkait dengan pelaksanaan tugas lembaga yudikatif seperti salah satu kasus yang diproses di Pengadilan Negeri Jambi terkait dengan keluarga pemimpin daerah setempat belum memberikan perhatian terhadap proses peradilan berjalan³¹

Peliputan parsial terhadap proses persidangan yang berjalan sebagaimana dicontohkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jambi tersebut justru akan kontra produktif terhadap upaya pengembangan demokrasi sebab penayangan liputan persidangan harusnya mengikuti prinsip-prinsip keadilan yaitu mengikuti asas praduga tak bersalah serta menyertakan argumentasi pembelaan tidak hanya mengutip dakwaan.

Karena itu TVRI daerah harus dapat mengupayakan pengembangan penghargaan terhadap sistem hukum dengan melakukan peliputan proses pengadilan secara komprehensif dan mewakili seluruh proses peradilan termasuk didalamnya pembelaan. Selain itu TVRI daerah hendaknya juga dapat melakukan liputan langsung berbagai kasus terkait dengan kepentingan umum sebagai salah satu upaya untuk memimalisir terjadinya praktek-praktek kecurangan di peradilan.

Perlu adanya peliputan berita dan ulasan terkait dengan proses persidangan yang terjadi di pengadilan secara komprehensif yang mengikuti setiap tahapan persidangan bagi TVRI stasiun daerah guna menghindari terjadinya pandangan negatif masyarakat terhadap keputusan yang dikeluarkan pengadilan negeri khususnya terkait dengan vonis yang dijatuhkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara, kurang komprehensifnya liputan media terhadap kasus korupsi menyebabkan masyarakat kerap terkejut dengan vonis yang diputuskan pengadilan sehingga dampak negatifnya, masyarakat beranggapan ada permainan yang dilakukan oknum petugas pengadilan terhadap kasus tersebut.

Karena itu diharapkan peliputan media terhadap kasus-kasus pidana baik itu pidana korupsi maupun pidana umum lainnya dilakukan pada tiap tahapan pengadilan sehingga masyarakat tidak terkejut dan dapat memahami dasar hukumnya ketika sebuah vonis dijatuhkan.

3. TVRI Daerah, Humas Pemerintah?

Untuk mengevaluasi sikap dari peran politik yang ditampilkan oleh TVRI daerah ada 2 (dua) hal utama yang harus dicermati sebagaimana dikemukakan Susan Pharr untuk mengamati peran TVRI daerah apakah sebagai penonton (*spectator*); kedua, sebagai penjaga (*watchdog*); ketiga, sebagai

pelayan (*servant*); dan keempat, sebagai penipu (*trickster*).³² Dua faktor tersebut adalah : *pertama*, kepemilikan dan kontrol publikasi; dan *kedua*, hubungan antara pemilik perusahaan media, jurnalis, dan pemegang kekuasaan.

Berdasarkan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP nomor 13 tahun 2005, TVRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi melayani masyarakat. Dengan statusnya itu, TVRI independen secara redaksional dan otonom dalam pengelolaan keuangan serta bukan lagi menjadi televisi pemerintah (*government owned television*). TVRI bukan lagi corong atau humasnya pemerintah melainkan lembaga penyiaran publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu terkait dengan faktor pertama tentang kepemilikan, TVRI daerah merupakan lembaga penyiaran publik yang dimiliki oleh negara. Kepemilikan TVRI daerah di tangan negara menjadikan TVRI daerah menjadi alat pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif. Hal ini terlihat dari dominasi liputan dan tayangan program yang disiarkan yang cenderung lebih banyak meliput kebijakan dan keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti Jambi membangun, Pelangi Desa, Dinamika Sumatera, Kaldeskop pada TVRI Jambi yang mayoritas menampilkan tayangan dan program dari sudut pandang eksekutif pemerintahan. Demikian pula yang terjadi pada TVRI Sulawesi Tenggara yang lebih banyak menampilkan narasumber dan tayangan yang bersumber dari pemerintah daerah atau dinas pada berbagai program yang ditayangkan seperti Pelangi Desa, Daerah Membangun dan kalender *event*.

Meski demikian pada TVRI Sulawesi Tenggara sudah mencoba untuk berimbang dalam meliput kebijakan dan berbagai program antara tiga pilar kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menayangkan program Masdarkum (Masyarakat Sadar Hukum) dengan narasumber dari lembaga yudikatif serta Suara Wakil Rakyat untuk mengupas berbagai kebijakan lembaga legislatif.

³¹ Wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Jambi pada 16 September 2011.

³² Susan Pharr dalam Siti Aminah, *Politik Media, Demokrasi Dan Media Politik*, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/POLITIK%20MEDIA.%20%20DEMOKRASI.pdf> diakses 15 Juli 2011.

³³ Penyerahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu sumber pembiayaan TVRI Daerah dimungkinkan karena dalam pasal 14, ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah NO.11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik menyatakan sumber pembiayaan TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari b. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Akan tetapi sumber pembiayaan TVRI daerah yang mayoritas berasal dari APBN dan kerjasama dengan Humas Pemerintah Daerah³³ menyebabkan TVRI daerah terjebak dalam penayangan liputan dan program yang berisi kegiatan seremonial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Akibatnya TVRI daerah tidak dapat melaksanakan perannya sebagai penjaga (*watchdog*) dalam pengembangan demokrasi melainkan lebih berperan sebagai pelayan (*servant*) lembaga eksekutif.

Keterbatasan penyertaan pembiayaan dari kedua lembaga lainnya baik itu lembaga legislatif dan yudikatif akibat ketiadaan pos anggaran khusus untuk pemberitaan dan peliputan media massa dalam struktur anggaran yang diperuntukkan bagi kedua lembaga tersebut. Bahkan pada lembaga yudikatif sama sekali tidak ada anggaran untuk kehumasan. Hal ini disebabkan karena fungsi kehumasan yang dilaksanakan oleh humas lembaga yudikatif seperti yang dilaksanakan oleh Humas Pengadilan Negeri Kendari bersifat pasif dan reaktif.

Jika kondisi ini terus menerus dibiarkan dikhawatirkan justru akan memberikan kontribusi negatif bagi pengembangan demokrasi. Untuk itu, TVRI daerah sebagai lembaga penyiaran publik seharusnya dapat melakukan peliputan dan penayangan program yang berimbang tentang ketiga lembaga tersebut. Pemahaman bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara bukan berarti memosisikan TVRI stasiun daerah sebagai humas dari pemerintah daerah dan kewajiban TVRI stasiun daerah sebagai salah satu lembaga penyiaran publik untuk melakukan peliputan dan penayangan program tentang program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh tiga lembaga pemegang kekuasaan dalam negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara berimbang perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

4. TVRI Daerah, Dilema Lembaga Penyiaran Publik

TVRI daerah sebagai institusi penyiaran sama halnya dengan institusi penyiaran lainnya dalam menetapkan kebijakan penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi dengan logika *never-ending circuit of capital accumulation* : *MCM (Money – Commodities – More Money* - lembaga penyiaran publik menitikberatkan perhatian kepada kepentingan dan kepuasan publik sebagai tolok ukur keberhasilan program.³⁴

Akan tetapi terdapat satu dilema yang harus dihadapi TVRI daerah sebagai lembaga penyiaran publik adalah target sasaran khalayak media

³⁴ Effendi Gazali, *op.cit*, hal.xii.

(*audience*) yang heterogen. Sifat heterogen khalayak itu jelas mencerminkan ketidaksamaan dalam hal kebutuhan mereka akan informasi. Masyarakat yang ada di pelosok Jambi atau Kendari, misalnya, tidak akan sama kebutuhan informasinya dengan masyarakat yang ada di kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya atau mungkin Makassar.³⁵

Kebutuhan masyarakat akan informasi itulah yang harus dipenuhi TVRI daerah sebagai salah satu lembaga penyiaran publik. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dibutuhkannya (*public's right to know*) merupakan salah satu kewajiban TVRI daerah sebagai salah satu wahana terjadinya diskursus masyarakat dalam rangka pengembangan demokrasi.

Namun di lain sisi sebagai lembaga penyiaran, TVRI daerah dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu bagaimana masyarakat sebagai *audiens* dapat memiliki minat untuk menonton liputan dan program yang ditayangkan.

Masyarakat sebagai *audiens* inilah yang menjadi pertimbangan utama TVRI daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang ada untuk menciptakan isi informasi dan program yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebab kinerja atau *performance* TVRI daerah sebagai lembaga penyiaran pada akhirnya diukur dari seberapa besar TVRI daerah mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut akan tayangan informasi dan program yang dihasilkan.

Dinamika industri penyiaran di Indonesia yang makin marak dengan persaingan antara para raksasa dalam industri penyiaran yaitu antara kelompok group media, Trans Corporation dan Media Group serta MNC berdampak signifikan terhadap kinerja TVRI daerah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya menciptakan program yang menarik bagi stasiun televisi yaitu: harus sesuai dengan audiens yang menjadi sasaran, acara harus spesifik menonjolkan salah satu aspek, kemasan harus bervariasi, penempatan waktu tayang yang tepat, program harus orisinal, kualitas program terjaga serta disajikan dalam bahasa yang dekat dengan audiens.

Karena itu dalam pengaturan pengembangan TVRI daerah sebagai lembaga penyiaran publik hendaknya tetap mengedepankan bagaimana upaya mengatur mekanisme kelembagaan dan pembiayaan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan TVRI daerah sebagai lembaga penyiaran dalam upaya menciptakan strategi pemasaran program

³⁵ Junaedi, TVRI dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat Lokal, makalah yang disampaikan dalam FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, 29 Juli 2011.

termasuk dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya ide dan gagasan yang *marketable* bagi penyiaran publik.

Namun dilain sisi TVRI stasiun daerah telah melakukan peran secara aktif dalam pengembangan demokrasi dalam bentuk menciptakan masyarakat *well informed* dan menjadi wadah aspirasi tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat dalam memberikan aspirasi politiknya melalui pogram dialog interaktif untuk kedua stasiun televisi dan acara Masdarkum untuk TVRI Sulawesi Tenggara.

Selain itu TVRI daerah juga melakukan monitor politik dengan tetap memelihara terciptanya perdamaian di daerah dengan melakukan *checks and balances* terhadap berbagai kejadian di Sulawesi Tenggara seperti terjadinya kasus pembunuhan terhadap dua mahasiswa Universitas Haluoleo. Dalam hal ini TVRI Sulawesi Tenggara telah menempatkan diri sebagai penjaga (*watchdog*). Pada kasus pembunuhan tersebut, TVRI Sulawesi Tenggara berusaha melakukan liputan yang berimbang dengan mengungkap penyebab terjadinya pembunuhan yang bermotif pemilihan umum kepala daerah dan berusaha menghindarkan pemberitaan yang mengarah pada kesukuan.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Peran TVRI Stasiun Daerah dalam pengembangan demokrasi berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan peliputan dan penyiaran serta progra, TVRI Stasiun Daerah masih didominasi oleh informasi yang berasal dari lembaga legislatif dan yudikatif.

Peliputan dan program untuk eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah provinsi menempati tempat tertinggi bila dibandingkan dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

Rendahnya kerja sama antara TVRI daerah dengan lembaga legislatif dan yudikatif disebabkan karena rendahnya anggaran kehumasan di lembaga legislatif dan ketiadaan anggaran kehumasan di lembaga yudikatif.

Selain itu mekanisme kerja kehumasan di lembaga yudikatif khususnya pengadilan negeri masih bersifat pasif mengingat kehumasan lembaga yudikatif yang bersifat aktif biasanya merupakan domain pusat yaitu departemen Hukum dan HAM.

Keberadaan TVRI sebagai perangkat politik pemerintah di masa lalu ditengarai menjadi salah satu penyebab TVRI stasiun daerah tidak mampu melepaskan diri dari label humas pemerintah sehingga TVRI tidak mampu

menjalankan peran utama sebagai wadah terjadinya diskursus publik dan sarana warga negara untuk dapat berpartisipasi langsung dalam penentuan kebijakan publik.

Namun dilain sisi TVRI stasiun daerah telah melakukan peran secara aktif dalam pengembangan demokrasi dalam bentuk menciptakan masyarakat *well informed* dan menjadi wadah aspirasi tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat dalam memberikan aspirasi politiknya melalui pogram dialog interaktif untuk kedua stasiun televisi dan acara Masdarkum untuk TVRI Sulawesi Tenggara.

Selain itu TVRI daerah juga melakukan monitor politik dengan tetap memelihara terciptanya perdamaian di daerah dengan melakukan *checks and balances* terhadap berbagai kejadian di Sulawesi Tenggara seperti terjadinya kasus pembunuhan terhadap dua mahasiswa Universitas Haluoleo. Dalam hal ini TVRI Sulawesi Tenggara telah menempatkan diri sebagai penjaga (*watchdog*). Pada kasus pembunuhan tersebut dengan melakukan liputan yang berimbang dengan mengungkap penyebab terjadinya pembunuhan yang bermotif pemilihan umum kepala daerah dan berusaha menghindarkan pemberitaan yang mengarah pada kesukuan.

B. Saran

Perlu adanya penegasan dalam pengaturan peliputan dan pemrograman yang dilakukan TVRI daerah secara berimbang antara ketiga lembaga mengingat sumber penerimaan terbesar dari TVRI daerah berasal dari APBN.

Perlu adanya pengaturan terhadap peliputan berita dan ulasan terkait dengan proses persidangan yang terjadi di pengadilan secara komprehensif yang mengikuti setiap tahapan persidangan bagi TVRI daerah sebagai lembaga penyiaran publik dalam pengaturan tentang mekanisme peliputan berita dan penyanggahan program lembaga penyiaran publik. Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya pandangan negatif masyarakat terhadap keputusan yang dikeluarkan pengadilan negeri khususnya terkait dengan vonis yang dijatuhkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi.

Pengaturan pengembangan TVRI stasiun daerah sebagai lembaga penyiaran publik hendaknya tetap mengedepankan bagaimana upaya mengatur mekanisme kelembagaan dan pembiayaan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan TVRI daerah sebagai lembaga penyiaran dalam upaya menciptakan strategi pemasaran program termasuk dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya ide dan gagasan yang *marketable* bagi penyiaran publik.

Daftar Pustaka

Buku

- Y. Ari Nurcahyo, "Merentas Demokrasi" dalam Soegeng Sarjadi Sukardi Rinakit, "Membaca Indonesia", Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2005.
- Indra Pahlevi "Kekuasaan Eksekutif di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2005
- Werner J. Severin & James W. Tankar Jr, "Teori Komunikasi, Sejarah, Metode & Terapan di dalam Media Massa, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Effendi Gazali, "Penyiaran Alternatif tapi Mutlak, Sebuah Acuan tentang penyiaran Publik dan Komunitas, Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta, 2002.
- Jonathan Bignell, *An Introduction To Television Studies*, Routledge, London & New York, 2004

Peraturan Perundangan

UUD 1945

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Internet

Douglas Kellner, Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention, <http://gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm> diakses 15 Juli 2011 pukul 17.45 WIB

Susan Pharr dalam Siti Aminah, *POLITIK MEDIA, DEMOKRASI DAN MEDIA POLITIK*, [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/POLITIK% 20MEDIA,%20%20DEMOKRASI.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/POLITIK%20MEDIA,%20%20DEMOKRASI.pdf) diakses 15 Juli 2011 pukul 15.00 WIB

Program TVRI Sulawesi Tenggara, <http://www.youtube.com/watch?v=cOw6fCBmxJY> diakses 15 Juli 2011 Pukul 17.00 WIB

Sejarah TVRI, <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HYll-V12PtCJ:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D117326+&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESiA8wzLr8mRjc6zzMt33drcdquAXcUkiWJI7YFEYZQqvVVIUqMQCaJHcwbImz473uKxAuKUQRiK->

TIQQ Qs94eNctafhZx RdiSe nx4iUtq6IFcPiBB1MhgDQu sZ5G77OShSn0&sig=AHIEtbTsCCxjfl A0SiyMXS5eFxfDvMzqQ diakses 15 Juli 2011 pukul 15.50 WIB

Visi dan Misi TVRI, <http://www.tvri.baliserve.com/home/home.php?mod=content&printer=1&id=15#visimisi> diakses 15 Juli 2011 pukul 15.30 WIB

TVRI, [http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi Republik Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_Republik_Indonesia) diakses 15 Juli 2011 pukul 16.30 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tenggara 2 Juli 2011.

Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 1 Juli 2011.

Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 4 Juli 2011.

Wawancara dengan Humas/Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada 5 Juli 2011.

Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi pada 13 September 2011.

Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi pada 12 September 2011.

Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada 13 September 2011.

Wawancara dengan Humas/Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada 16 September 2011.

FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, 29 Juli 2011.

FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di TVRI Sulawesi Tenggara, Kendari 5 Juli 2011.

Makalah

Junaedi S., Msi, TVRI dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat Lokal disampaikan dalam FGD tentang Peran Stasiun TVRI Daerah Dalam Pengembangan Demokrasi di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, 29 Juli 2011.